

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH JASA
STERILISASI KUCING
(Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

AIDA APRILIANY
NPM. 1621030035

Jurusan : Muamalah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H / 2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH JASA
STERILISASI KUCING
(Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

AIDA APRILIANY

NPM. 1621030035

Jurusan : Muamalah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I.,M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam penulisan skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahan atau kekeliruan persepsi, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan yang meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi suatu objek penelitian.¹

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara yang bersifat terperinci, berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (*Al-Qur'an dan Al-Sunnah*).²

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³

Jasa adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 1811.

²Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), h. 15.

³Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1985.

⁴*Ibid.* h. 895.

Sterilisasi adalah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada hewan atau manusia dengan menghilangkan alat kelamin atau menghambat fungsinya.⁵

Kucing adalah dalam bahasa lainnya disebut *Felis Silvestris*, adalah sejenis karnivora (binatang pemakan daging) dari keluarga *Felidae* yang sudah dijinakkan selama ribuan tahun. Kucing adalah hewan pemakan daging sejati. Kata kucing biasanya merujuk kepada “kucing” yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing raksasa, seperti singa, harimau, macan, dan sebagainya.⁶

Berdasarkan beberapa penegasan judul di atas, maka dapat dipahami maksud judul dalam skripsi ini adalah Upah Jasa Sterilisasi Kucing Dalam Pandangan Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan sehingga memotivasi penulis untuk membahas dan meneliti masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Alasan objektif yang membuat penulis tertarik untuk memilih dan membahas judul ini, yaitu:

- a. Jasa sterilisasi terhadap kucing sedang banyak diminati oleh para pecinta kucing. Mengingat praktik upah jasa sterilisasi pada kucing hanya dilakukan oleh dokter hewan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, sehingga kucing akan tetap aman. Penulis juga tertarik mengambil studi

⁵*Ibid.* h. 1387.

⁶Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing*, (Depok: Arya Duta, 2010), h.3.

kasus di Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung dikarenakan klinik hewan ini tidak hanya melakukan sterilisasi pada kucing ras, namun juga terhadap kucing-kucing jalanan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut.

- b. Persoalan sterilisasi pada kucing di dalam masyarakat terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarang dengan alasan sterilisasi dianggap menyakiti kucing dan mengambil hak hewan untuk berkembang biak.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini relevan dengan disiplin keilmuan yang penulis ampu yaitu Fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), UIN Raden Intan Lampung.
- b. Sepanjang sepengetahuan penulis terkait dengan judul bertema penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing ini belum pernah ada yang membahas khususnya di prodi *Muamalah* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, sehingga penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, maupun *muamalah*. Salah satu ajaran yang penting adalah dalam bidang *muamalah* yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh satu individu

dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Beberapa bentuk kegiatan dalam kajian *muamalah* ialah jual-beli (*ba'i*) dan sewa-menyewa atau jasa (*ijarah*).⁷

Pengertian *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁸ Ulama bersepakat bahwa *ijarah* dibolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضِعَ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Hadis riwayat Ibn Majah dari Abdullah bin ‘Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَحْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)⁹

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

⁷Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), h. 7.

⁹Muhammad bin Yazid Abu „Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al- Fikr, Beirut, 2004, h. 20

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.

Sedangkan jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak berupa produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, kesehatan) atau penyelesaian atas masalah yang dihadapi konsumen.¹⁰

Pada masa kini sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat. Baik itu sewa-menyewa barang ataupun sewa-menyewa jasa yang ditawarkan oleh pemilik barang ataupun penyedia jasa. Salah satunya ialah jasa sterilisasi kucing. Jasa sterilisasi kucing marak dilakukan oleh para pecinta kucing.

Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dijadikan peliharaan. Jenis kucing yang umum dijadikan peliharaan beragam, mulai dari *Angora*, *Persia*, *Ragdoll*, *Siam* bahkan jenis domestik atau yang biasa kita sebut kucing kampung. Harga kucing beragam berdasarkan rasnya. Kucing merupakan salah satu hewan yang membutuhkan perawatan yang rumit. Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan kucing tidak sedikit. Misalnya untuk sekali memandikan kucing di *Pet Shop* biaya yang harus dikeluarkan adalah mulai dari Rp. 75.000 – Rp. 180.000, *cat food* atau makanan kucing harganya beragam, tergantung *merk* dan kandungan gizi dalam makanan kucing tersebut. Belum lagi biaya pengobatan yang harus dikeluarkan apabila kucing sakit.

¹⁰Rambat, Lupiyoadi, A.Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 26.

Kucing mampu bereproduksi tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Hal ini dapat menyebabkan populasi kucing meningkat secara cepat. Populasi kucing yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah tersendiri bagi manusia, karena kucing bisa menjadi pembawa penyakit dan menularkannya kepada manusia. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan ke manusia biasa dikenal dengan istilah *zoonosis*. Salah satu penyakit pada kucing dan dapat ditularkan pada manusia adalah *toxoplasmosis*. Penyakit ini dikenal dengan nama *toxoplasma gondii*, yaitu suatu parasit *intracellular* yang banyak terinfeksi pada manusia dan hewan. Penderita *toxoplasmosis* sering tidak memperlihatkan gejala klinis yang jelas sehingga dalam menentukan diagnosis, penyakit *toxoplasmosis* sering terabaikan dalam praktik dokter sehari-hari. Apabila penyakit *toxoplasmosis* menjangkit wanita hamil trimester ketiga dapat mengakibatkan *hydrocephalus*, *chorioamnionitis*, tuli atau epilepsi.¹¹

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan populasi kucing yang terus berkembang pesat adalah dengan dilakukannya sterilisasi kucing. Klinik Hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung merupakan satu diantara klinik hewan yang menyediakan jasa sterilisasi kucing. Sterilisasi sendiri merupakan proses menghilangkan kemampuan berkembang biak pada hewan maupun manusia dengan menghambat fungsi reproduksinya. Pada kucing jantan dilakukan kastrasi atau kebiri dengan mengambil bagian testis (biji/buah zakar) pada kucing, sedangkan pada kucing betina dilakukan *ovariohystrektomi* dengan mengambil ovarium (indung telur) dan uterus

¹¹Sulaiman & Tim Redaksi Cemerlang, *Berbisnis Pembibitan Kucing-Dari Hobi Menjadi Uang* (Yogyakarta: Lyly Publisher, 2010), h. 107.

(rahimnya).¹² Biaya jasa sterilisasi pun beragam, namun di Klinik hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung biaya yang dikenakan untuk jasa sterilisasi sebesar, yaitu pada kucing jantan Rp. 700.000 dan pada betina Rp. 900.000.¹³

Steriliasi pada kucing masih menuai pro dan kontra. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30:

... لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴿٣٠﴾

“Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah” (QS. Ar-Rum: 30)¹⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut mengartikan bahwa diharamkannya kebiri pada binatang.

Imam Ahmad pernah mengatakan:

لَا يَعْجِبُنِي لِلرَّجُلِ أَنْ بَخَصِيَ شَيْئًا، وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلَّهِ الْوَارِدِ عَنْ إِبْلَامِ الْحَيَوَانِ

“Aku tidak menyukai jika ada seseorang yang mengebiri binatang. Hal itu dibenci karena terdapat larangan tentang menyakiti binatang”¹⁵

Sterilisasi dianggap membahayakan dan menyakiti kucing sebagai objek percobaan. Sterilasi menghilangkan fungsi reproduksi dari seekor kucing, membuat kucing menjadi mandul dan tidak dapat berkembang biak sebagaimana mestinya. Hal itu dianggap melanggar hak dan fitrah kucing sebagai makhluk hidup untuk memiliki keturunan.

¹²<http://www.disnaksubang.com/berita-pendampingan-dan-pelatihan-sterilisasi-pada-anjing-dan-kucing.html>, (25 september 2019 pukul 19.00 wib).

¹³Heru Setiawan, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan GRANDIA Pet Care, Bandar Lampung, 22 Januari 2020.

¹⁴Departemen agama RI, *Al qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra 1989), h.645.

¹⁵Ibnu Muflih,*Al Adab Asy Syar'iyah Wa Al Manh Al Mar'iyah*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm 2006), h. 263

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait masalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan sterilisasi pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung dilakukan oleh dokter hewan yang mana upah jasa sterilisasi yang dikeluarkan untuk setiap ekor kucing sebesar yaitu pada kucing jantan Rp. 700.000 dan pada betina Rp. 900.000.
2. Terjadi pro dan kontra terhadap praktik upah jasa sterilisasi kucing dengan alasan karena upah jasa sterilisasi pada kucing didapat dari menyakiti binatang dan mengambil hak kucing untuk berkembang biak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan fokus masalah di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah jasa sterilisasi kucing pada Klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan mampu memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa sterilisasi pada kucing, dan diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran Islam, serta civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan *Muamalah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi klinik hewan GRANDIA Pet Care

Dapat dijadikan edukasi atau informasi mengenai upah jasa sterilisasi kucing sesuai dengan perspektif Islam, sehingga memberikan rasa nyaman kepada para pengguna jasa sterilisasi kucing.

- b. Bagi penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- c. Bagi peneliti berikutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai upah jasa sterilisasi kucing dalam hukum Islam

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen dalam penelitian. Semua metode yang digunakan peneliti disebut sebagai metode penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian dan penyusunan adalah upah jasa sterilisasi di klinik hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung.

¹⁶Kris H. Timotius, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2017), h. 5.

¹⁷*Ibid* h. 13.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah objek penelitian, responden penelitian, atau dokumen, baik yang dipublikasikan atau tidak.¹⁸ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan, misalnya melalui wawancara, dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah antara lain Drh. Heru Setiawan selaku dokter hewan di klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung dan konsumen yang menggunakan jasa sterilisasi.

b. Data sekunder

Data sekunder yang berfungsi menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen penting yang berhubungan dengan praktik *ijarah* yang dalam hal ini berupa upah jasa sterilisasi kucing.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu 110 orang, yang terdiri dari 1

¹⁸*Ibid* h. 64.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 80.

orang dokter hewan dan 109 orang pemilik kucing yang menggunakan jasa sterilisasi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan waktu, dana atau tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Menurut Prof. Dr. Sugiyono penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10% maka penulis mengambil 10% sampel dari populasi yang ada yaitu sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 orang dokter hewan, dan 10 orang pemilik kucing.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.²¹ Wawancara dalam penelitian ini diambil dari responden dokter hewan di klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung dan pemilik kucing. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

²⁰*Ibid*, h. 87.

²¹*Ibid*, h. 137.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan didukung pula dengan menggunakan tanya jawab melalui *WhatsApp* untuk mendapatkan informasi yang berkaitan tentang penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²² Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh penulis, hanya hal-hal yang terkait atau yang relevan dengan data-data yang dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar.²³

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.²⁴

5. Pengolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

²²*Ibid*, h. 145.

²³*Ibid*, h. 204.

²⁴*Ibid*, h. 240

- b. Rekontruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.
- c. Sistematisasi data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan penulis pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad Dalam Islam

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya adalah *aqdu* yang berarti mengikat dan *ahdu* yang berarti janji.²⁵ Kata akad berasal dari bahasa *arabal*- '*aqd* bantuk jamaknya adalah *al uqud* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan dan buah atau lebih perikatan.²⁶

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.²⁷

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang qabul adalah pernyataan

²⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), h.274.

²⁶Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet I, 2011), h.25.

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.²⁸

b. Dasar Hukum Akad

1. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Maidah: 1).²⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa para mukmin diwajibkan untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya, Muhammad.³⁰

²⁸Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), h.76-77.

²⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.51.

³⁰Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Darus Sunnah, Jilid: III, 2004)

2. Dasar Hukum yang kedua juga berdasarkan firman Allah SWT QS.

Ali- ‘Imran (3) ayat (76):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali- ‘Imran [3]: 76)³¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

c. Rukun Dan Syarat Akad

1) Rukun akad

Dalam pengertian *fuqaha'* rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.³²

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.76

³²Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 110.

a) Aqid

Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

b) Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih ialah setiap benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Diantara syaratnya ialah:

1) Objek akad harus jelas

Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya.

2) Objek akad harus barang yang diperbolehkan.

3) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

4) Objek akad dapat diserahkan atau ditunda berdasarkan kesepakatan.

5) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.

c) *Maudhu' al'aqd*

Maudhu' al'Aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'iwadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.³³

d) *Sighat al 'aqd*

Sighat al 'Aqd yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.³⁴

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47.

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya:
 “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan atau *kitabah*, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan *kitabah* atau tulisan.
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.

- 4) Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan).

2) Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.³⁵

Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua, yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Berikut syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus:

a) Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila,

³⁵Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 34.

orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.

- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:
- 1) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.
 - 2) Syarat *taqyid* adalah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim ke rumah pembeli dibebankan kepada penjual.

3) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menanggihkan pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua bulan yang akan datang.

Beberapa unsur akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak, diantaranya yaitu:

a) Syarat terbentuknya akad

Dalam hukum Islam syarat terbentuknya akad dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*, syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:³⁶

- 1) *Shighat* akad (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian ijab dan qabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.
- 2) Berbilangnya para pihak
- 3) Berakal/*tamyi'z*
- 4) Objek akad dapat diserahkan
- 5) Objek akad ditentukan, dan
- 6) Objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad

b) Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi

³⁶Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, cet I, 2011), h. 32-33

ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- 2) Tidak menimbulkan kerugian (*darar*)
- 3) Tidak mengandung ketidakjelasan ataupun riba.

c) Syarat-Syarat Berlakunya Akibat Hukum

Syarat tersebut adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat itu adalah:

- 1) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad
- 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

d. Berakhirnya Akad

1) Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal ini yang menyebabkan timbulnya *fasakhnya* akad adalah sebagai berikut:

- a) *Fasakh* karena akadnya *fasid* (rusak)
- b) *Fasakh* karena *khiyar*
- c) *Fasakh* berdasarkan *iqalah*, yaitu terjadinya *fasakh* karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- d) *Fasakh* karena tidak adanya realisasi.
- e) *Fasakh* karena jatuh tempo atau tujuan akad telah tercapai

2) Berakhirnya akad karena kematian. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya seperti akad dalam *ijarah*, *rahn*, *kafalah*, *syirkah* dan *wakalah*.

2. *Ijarah* Dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan bayaran imbalan tertentu.³⁷ Secara etimologi *ijarah* adalah Masdar dari kata *جر - يا جر* (*ajara - ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai imbalan atas sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah sebuah pengganti, baik yang bersifat materi ataupun immaterial.³⁸

Sedangkan sebutan *al-ijarah* adalah bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, upah mengupah, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³⁹ *Ijarah* sering juga disebut sebagai upah mengupah, walaupun secara operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga sedangkan sewa untuk barang atau benda.⁴⁰

Menurut Muhammad Shalih al Munajjid dalam bukunya intisari fikih Islam yang diterjemahkan oleh Nurul Mukhlisin menyatakan *ijarah*

³⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Ed. IV, Cet. Ke. VII, 2010) h.138.

³⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

³⁹H. Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, Ed. I, Cet. Ke. II, 2017) h. 136.

⁴⁰H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke.V, 2010) h. 113.

adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibolehkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati.⁴¹ Sedangkan menurut Zainudin Ali dalam bukunya Hukum perdata Islam di Indonesia, *ijarah* adalah suatu akad atau transaksi sewa menyewa antara penyewa dan pihak yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.⁴²

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dan/atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa tersebut.⁴³

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari pihak lain dengan cara membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁴

Menurut Syarifuddin, *ijarah* secara Bahasa dapat diartikan sebagai akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari suatu benda, maka disebut *ijarah al'ain* seperti menyewa toko atau rumah untuk tempat tinggal, namun bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari

⁴¹Muhamad Shalih al-Munajjid, *Intisari Fikih Islami*, terj. Nurul Mukhlisin (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), h.159.

⁴²Zinuddin Ali, *Hukum, Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 150.

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 177.

⁴⁴Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005) h .377.

jasa tenaga seseorang maka disebut *ijarah ad-dzimah*, contohnya upah potong rambut atau upah jasa tenaga kesehatan.⁴⁵

Taqyuddin an-Nabhani juga menyebutkan dalam bukunya, bahwa sewa menyewa atau *ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajiir*.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu bentuk akad atau transaksi sewa menyewa suatu barang dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri atau dapat juga diartikan sebagai upah mengupah atas suatu jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan jasa (upah).

Pengertian *ijarah* menurut pendapat ulama, diantaranya adalah:

- 1) Menurut ulama shafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.
- 2) Menurut Ali Al-Khafif, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan adanya imbalan.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke III 2003) h. 216.

⁴⁶ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 83.

- 3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* yaitu pemilikan suatu manfaat yang dibolehkan dalam kurun waktu tertentu dengan adanya imbalan.⁴⁷

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Yang dimaksud dasar hukum *ijarah*, ialah landasan sumber hukum dibolehkannya *ijarah*.

1) Landasan Al-Qur'an

a) Q.S. At-Talaq ayat 6

أُسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرٌ لَكُمْ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴⁸

Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani *idah*. Jika

⁴⁷Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sidoarjo: CV Cahaya Intan, XII. 2014),h. 72.

⁴⁸M Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 300.

istri yang di talak *ba'in* sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa *idahnya*. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah (upah) oleh sang suami sebesar yang umum berlaku.⁴⁹

2) Landasan dari Hadist

Hadis riwayat Ibn Majah dari Abdullah bin ‘Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَحِيرَ
أَحْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ⁵⁰

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

3) Ijma ulama

Pada masa sahabat umat Islam telah ber-*ijma* bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *muamalah*, bahwa semua bentuk *muamalah* adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ibnu Qudamah juga menambahkan bahwa ulama dari seluruh negeri bersepakat *ijarah*

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Al-qur'an Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

⁵⁰Muhammad bin Yazid Abu „Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al- Fikr, Beirut, 2004, h. 20

diperbolehkan.⁵¹ Pakar-pakar dan cendikiawan di seluruh negeri telah bersepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia selalu terbentur akan keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu manusia selalu selalu terikat dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Ijarah merupakan salah satu aplikasi yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa *ijarah* merupakan salah satu bentuk aktivitas antar manusia yang bertujuan untuk saling meringankan. *Ijarah* juga merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama.⁵²

c. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Menurut ulama Hanfiah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵³ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari empat macam, yaitu:

1) *Aqid* (Orang Yang Berakad)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa ada dua pihak atau dua orang, yang disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang

⁵¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 316.

⁵²Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.79.

⁵³Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

yang memberikan upah dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Untuk kedua belah pihak yang berakad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jika salah seorang yang berakad itu tidak berakal/gila atau tidak dapat membedakan maka akad *ijarah* tersebut tidak sah.⁵⁴

2) *Sighat* (Ijab Dan Qobul)

Yaitu suatu ungkapan atau pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad *ijarah*. Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab.⁵⁵

3) *Ujrah* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. *Ujrah* juga dapat diartikan juga sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205.

⁵⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),h. 63.

4) Manfaat

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan didapatkan dari barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja. Manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijarah* harus dijamin, karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi.⁵⁶ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam manfaat sebagai objek akad ini adalah:

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b) Manfaat dari barang harus dapat dinilai dan dilaksanakan.
- c) Pemenuhan manfaat harus sesuatu yang dibolehkan.
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan Syariah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* atau ketidaktahuan yang akan menyebabkan sengeketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.
- g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan nasabah kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat.
- h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 321.

- i) Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau dikuasai.⁵⁷

Dalam *ijarah* terdapat empat macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Syarat *In'iqad*

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali syarat melakukan transaksi *ijarah* adalah *baliqh* dan *berakal*, sehingga apabila pihak yang bertransaksi *ijarah* tersebut gila atau layaknya anak kecil maka akad *ijarah* tersebut tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa pihak yang melakukan *ijarah* tidak harus *baliqh*, anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *ijarah* dengan syarat diketahui oleh wali anak tersebut.

2) Syarat *nafadz* (Syarat Berlangsungnya Akad)

Yaitu terpenuhinya hak milik, apabila *aqid* tidak memiliki hak kepemilikan atas barang atau jasa yang menjadi objek akad *ijarah* maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal tersebut maka akad *ijarah* bersifat *mauquf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda dengan dengan

⁵⁷Fatwah Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MU/VI/2000 Tentang *Pembiayaan Ijarah*

pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukum akad *ijarah* tersebut adalah batal.⁵⁸

3) Syarat Lazim

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri dari dua hal, yaitu:

a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada barang sewaan, maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan akad atau membatalkannya

b) Tidak ada uzur yang membatalkan akad

Uzur dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan itu menjadi sia-sia
2. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk alasan tertentu dan tidak ada jalan lain selain menjualnya
3. Uzur barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi tetapi menyebabkan kerugian pada orang lain.⁵⁹

4) Syarat Sah *Ijarah*

a) Kerelaan dari dua orang yang berakad

Maksudnya adalah masing-masing pihak yang berakad rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, jika di dalam suatu

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 324.

⁵⁹ Asy-Syaikh Ali, Terjemahan Fikih Muyassar, *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 388.

perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah.

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nissa ayat 29 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu. (Q.S An-nissa : 29)⁶⁰

- b) Pihak yang berakad harus berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus.
- c) Hendaknya masa *ijarah* itu diketahui karena dapat menimbulkan perselisihan. Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi dibolehkan selamanya, dengan syarat asalnya masih tetap sama. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Shafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987), h. 122.

menyebabkan ketidaktahuan tentang waktu yang wajib dipenuhi.⁶¹

- d) Keadaan manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui dengan jelas, karena manfaat barang atau jasa tersebut merupakan objek akad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli.
- e) Penjelasan manfaat, penjelasan manfaat dilakukan agar benda atau jasa benar-benar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan yang dibolehkan oleh *syara'*
- f) Penjelasan jenis pekerjaan, Yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Barang yang disewakan atau jasa yang dibutuhkan merupakan sesuatu yang suci dan halal. Pemanfaatan barang harus sesuatu yang dibenarkan oleh Syariat Islam.
- g) Hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah alat tukar atau pengganti dalam suatu transaksi, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli)
- h) Kondisi manfaat harus dapat diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijarah* apabila manfaatnya tidak bisa diambil. Misalnya menyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan pengelihan.

⁶¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 127.

- i) Manfaat yang disewakan merupakan milik sah penyedia jasa atau diizinkan olehnya.⁶²

d. Macam-macam *Ijarah*

Menurut objeknya, ulama fiqih membagi *ijarah* menjadi dua macam, yaitu:

1) Ijarah Bi Al-Amal

Yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama *fiqih ijarah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas dan bukan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Syariah. Contohnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik atau yang lainnya. *Ijarah Bin Al-Amal* ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji asisten atau pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menyewakan jasanya untuk kepentingan orang banyak contohnya: buruh pabrik, buruh bangunan dll. Kedua bentuk *al-ijarah* ini menurut para ulama hukumnya boleh.

2) Ijarah Bi Al-Manfa'ah

Yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya:

⁶²Asy-Syaikh Ali, Terjemahan Fikih Muyassar, *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 388.

a) Sewa menyewa toko

Sewa menyewa toko, rumah, dan sejenisnya diperbolehkan. Penyewaan harus sesuai dengan akad, baik tujuannya maupun masanya. Rumah yang telah disewa boleh disewakan kembali oleh penyewa pertama. Rumah yang disewa harus dijaga dan dirawat oleh pihak penyewa.

b) Sewa menyewa tanah

Dalam menyewakan tanah, harus jelas maksud dan tujuan penyewaan tanah tersebut, bila tanah tersebut disewa untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang dilarang dalam Syariah maka *ijarah* tersebut menjadi tidak sah.

c) Sewa menyewa baju dan lain-lain

Sewa menyewa baju atau semacamnya juga diperbolehkan dalam *ijarah*, dengan ketentuan pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan sudah setuju dan rela dengan akad *ijarah* tersebut.⁶³

e. Kewajiban *Mu'jir* (Orang Yang Menyewakan) Dan *Musta'jir* (Penyewa)

- 1) Jika seseorang disewa (diupah) jatuh sakit, maka digantikan dengan orang lain sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali telah disepakati jika ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, maka ia tidak boleh digantikan. Karena terkadang

⁶³Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014), h. 202.

tujuan dari akad *ijarah* tersebut tidak bisa tercapai bila digantikan dengan orang lain atau orang yang berbeda.

- 2) Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang telah disewa tidak boleh meminta upah atau bayaran sebelum menyelesaikan tugas atau pekerjaannya terlebih dahulu. Jika yang disewa benda, maka pemilik boleh meminta upah atau bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhkan atau setelah pemilik menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang. Karena bayaran adalah ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik kecuali dengan diserahkannya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.
- 3) Orang yang disewa wajib bekerja sungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa ia wajib terus bekerja dan tidak melewatkan waktu dari masa penyewaannya tersebut. Dan, hendaknya ia bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.⁶⁴
- 4) Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan.

⁶⁴Shaleh al-Fauzan, *Fikih sehari-hari, terj.* Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 483.

- 5) Penyewa, ketika menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika awal menyewanya.
- 6) *Ijarah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan salah satu bentuk akad dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan jual beli. Dan, masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka hal ini boleh membatalkannya.
- 7) Orang yang menyewakan wajib memberikan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberikan keleluasaan untuk memanfaatkannya selama benda yang disewakan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan atau tidak dilarang dalam Syariah.⁶⁵

f. Berakhirnya Akad *Ijarah*

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, hal ini merupakan pendapat dari ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak menyebabkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal itu dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa sekaligus sebagai pihak yang memiliki hak milik tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

⁶⁵*Ibid*, h. 485.

- 2) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk dilanjutkan. Contohnya apabila menyewakan binatang tunggangan lalu binatang itu mati, menyewakan rumah lalu rumah itu hancur, dll.
- 3) *Iqalah*, yaitu pembatalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan *ijarah* adalah akad *muawadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada uzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa panen selesai. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.⁶⁶

3. Sterilisasi Kucing Dalam Islam

a. Pengertian Sterilisasi

Sterilisasi adalah proses pemandulan pada organ reproduksi. Pada kucing betina disebut *spay*, *femal neutering*, atau *sterilization* sedangkan pada kucing jantan disebut *neutering*, kastrasi atau kebiri.⁶⁷ Sterilisasi bisa juga diartikan sebagai perlakuan meniadakan kesanggupan berkembang biak pada hewan atau manusia dengan meniadakan alat kelamin atau menghambat fungsinya.⁶⁸

⁶⁶*Ibid.* h. 338.

⁶⁷Desi Saraswati, *242 Tips Merawat Binatang Kesayangan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, Cet. I, 2009), h.33.

⁶⁸Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h. 1387.

Sterilisasi diartikan sebagai tindakan pengangkatan ovarium serta uterus pada betina dan pemotongan testis (buah zakar) pada jantan dengan tujuan menghentikan kemampuan berkembang biak pada hewan.⁶⁹ Sterilisasi pada manusia berbeda dengan sterilisasi terhadap hewan, manusia dapat mengontrol populasinya dengan cara program KB (pil, suntik, UID) namun pada hewan cara tersebut tidak dapat dilakukan karena hormon kucing berbeda dengan manusia. Pemberian KB manusia kepada kucing, dapat menyebabkan saluran reproduksi kucing dipenuhi nanah dan berujung pada kematian.

Sterilisasi adalah tindakan pembedahan pada hewan,. Pada hewan jantan dapat dilakukan kastrasi berupa pemotongan testis dari tubuh sedangkan pada betina dilakukan dengan cara pengangkatan ovarium saja atau mengangkat ovarium beserta uterusnya. Pembedahan ini dilakukan dalam keadaan hewan tidak sadar (anastesi umum).⁷⁰

Pada dasarnya melakukan operasi sterilisasi pada kucing adalah dilarang. Sebab operasi tersebut termasuk ikhshaa' atau pengebirian yang dapat memandulkan binatang (tidak berketurunan).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA:

(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ وَالْخَيْلِ. رواه أحمد)

“Rasulullah SAW telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang”

⁶⁹Nelson, R.W, Couto, C.G..*Small Animal Internal Medicine*. (Missouri: Mosby, Ed. 3, 2003), h. 879.

⁷⁰I Komang Wiarsa Sardjana, *Bedah Veteriner*, (Surabaya: Unair Press, 2011), h.12.

(H.R. Ahmad dari Ibnu Umar No. 4539).⁷¹

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas RA

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ وَعَنْ إِخْصَائِهِمْ نَهْيًا شَدِيدًا. (أَخْرَجَهُ الْبَزَارُ)
 “Bahwasanya Nabi SAW telah melarang mengurung/menahan (binatang) yang bernyawa (dan membunuhnya sampai mati dengan panah atau yang semisalnya) dan melarang mengebiri binatang dengan larangan yang keras” (H.R. al-Bazzar dari Ibnu Abbas)⁷²

Namun dalam kaidah fiqih menyebutkan:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَا تَانِ رُعَا عَظُمُهُمَا ضَرَرًا بَارِكَابٍ أَخْفَاهُمَا
 “Jika bertentangan dua mafsadat (bahaya), maka dilihat mana bahaya yang lebih besar dan diambil bahaya yang lebih ringan dari keduanya.”⁷³

Imam Ibnu Utsaimin mengatakan:

إِذَا كَانَتْ الْقِطْعُ كَثِيرَةً مُؤْذِيَةً ، وَكَانَتِ الْعَمَلِيَّةُ لَا تُؤْذِيهَا : فَلَا حَرَجَ لِأَنَّ هَذَا أَوْلَى مِنْ قَتْلِهَا بَعْدَ خَلْقِهَا وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ قِطْعًا مُعْتَادَةً وَلَا تُؤْذِي : فَلَعَلَّ فِي بَقَائِهَا تَنَامَى خَيْرًا
 “Jika populasi kucing terlalu banyak dan mengganggu, sementara tindakan mengebiri tidak sampai menyakitinya, tidak masalah mengebiri kucing. Ini lebih baik dari pada membunuh setelah kucing itu hidup. Namun jika kucing itu tidak mengganggu, barangkali dibiarkan berkembang biak akan menyuburkan kebaikan”.⁷⁴

Walaupun di Indonesia sendiri belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang sterilisasi, namun Majelis Ulama Islam Singapura (Majelis Agama Islam Singapura) telah mengeluarkan fatwah tentang sterilisasi, yaitu:

⁷¹Imam Syaokani, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), h. 660, hadits no. 3581

⁷²*Ibid*, h.1661

⁷³Imam Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah), h.

⁷⁴ASy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamī, *Al-Fatāwal Kubrol Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Lebanon), h. 10502

The Fatwa Committee has discussed the issue of neutering cats and concluded on 22nd June 1994 the following fatwa.

- 1) *There are plans to ensure that cats in Singapore are properly neutered. This is to ensure that the number of homeless and abandoned cats is controlled* (mengontrol kucing terlantar)
- 2) *The party involved in this effort has clarified that neutering will not cause any pain or harm to the animal. There will not be any side effects on cats which have been neutered. Subsequently they have sought the Fatwa Committee's view on this and whether it is contradictory to any Islamic teachings* (tidak akan menyebabkan kondisi sakit dan menyakitkan pada kucing, tidak ada efek samping setelah sterilisasi)
- 3) *Fundamentally, all Islamic legal schools of thought (mazhab) allow the neutering of animals albeit they differ on the kinds of animals which are permitted for it to be performed on. The Hanafi mazhab is of the view that it is permissible to neuter animals on the basis of necessity and need¹. However, the other school of thoughts (mazhab) allows only the neutering of animals which are allowed for Muslims to consume* (Mahzab Hanafi memperbolehkan sterilisasi hewan jika dibutuhkan, sedangkan mazhab lainnya hanya hewan untuk dikonsumsi)
- 4) *After considering the evidences and basis of the different schools of thought and the medical advice of Society of Prevention of*

Cruelty Against Animal's (SPCA) veterinarian, the Fatwa Committee opines that the neutering of cats on the basis of necessity is permissible.(setelah mempertimbangkan, maka sterilisasi kucing berdasarkan kebutuhannya di bolehkan. Sesuai dengan pernyataan berikut:” Reconizing the lighter of two harms” tidak merugikan kedua belah pihak)⁷⁵

b. Syarat-syarat Sterilisasi Kucing

- 1) Kucing harus dalam keadaan sehat dan sebaiknya sudah divaksinisasi lengkap.
- 2) Berat badan kucing minimal 1,7 kg.
- 3) Kucing harus berpuasa terlebih dahulu kurang lebih 8-10 jam sebelum di sterilisasi.
- 4) Umur kucing minimal 6 bulan baik jantan ataupun betina.
- 5) Kucing tidak dalam keadaan bunting atau hamil.
- 6) Jangan memandikan kucing saat mendekati hari H sterilisasi.⁷⁶

c. Perawatan Pasca Sterilisasi

Secara umum perawatan pasca sterilisasi tidak terlalu rumit, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik kucing agar kucing lebih cepat pulih kembali.

- 1) Kucing akan merasa pusing setelah bangun dari operasi sterilisasi, maka kucing wajib untuk dikandangkan/dikamarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

⁷⁵Administration Of Muslim Law Act (Chapter3, Section 32) Fatwa Issued By Fatwa (Legal) Committee , Islamic Religious Council Of Singapore

⁷⁶Dellmann, H, Dieter, *Buku Teks Histologi Veteriner II*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 167.

- 2) Hari kedua pasca sterilisasi kucing masih lemas dan nafsu makan belum kembali normal, maka pemilik harus menyediakan ruang yang nyaman agar kucing terhindar dari stres.
 - 3) Pastikan kucing tidak menjilat, menggigit, atau menarik narik lukanya untuk menghindari infeksi. Bila perlu gunakan *e-collar*.
 - 4) Jagalah luka dan area sekitar bekas operasi steril pada kucing tetap bersih dan kering. Jika kebetulan luka basah, keringkan secara perlahan dengan menggunakan kapas atau kain bersih.
 - 5) Hari berikutnya nafsu makan kucing sudah kembali normal bahkan cenderung meningkat, maka tugas pemilik adalah mengontrol pola makan kucing untuk menghindari obesitas.
 - 6) Hari ke 7 pasca operasi steril, perban luka pada kucing betina akan dibuka dan dibersihkan lalu diberi obat merah.
- kucing jantan lebih cepat pulih dibanding kucing betina dan perawatan pasca steril pun lebih mudah jika dibandingkan dengan kucing betina.⁷⁷

d. Biaya Sterilisasi

Biaya atau upah jasa dari sterilisasi kucing berbeda pada tiap klinik hewan, namun pada klinik hewan GRANDIA Pet Care yang beralamat di Jalan Griya Utama No. 1, Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung yang di kelolah oleh Drh. Heru Setiawan adalah pada kucing jantan sebesar Rp. 700.000 dan untuk betina sebesar Rp. 900.000 untuk upah

⁷⁷Heru Setiawan (Dokter Hewan), Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 22 Januari 2020.

jasa sterilisasinya saja dan untuk biaya pergantian perban serta obat-obatan berkisar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 tergantung kebutuhan masing-masing kucing.

e. Macam-Macam Penyakit Pada Kucing

Zoonosis merupakan sebutan bagi penyakit-penyakit dan infeksi yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan atau sebaliknya. Penyakit zoonosis terdiri dari berbagai macam penyakit menular yang secara biologis berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Ada beberapa cara menggolongkan penyakit zoonosis, antara lain berdasarkan cara penularannya, berdasarkan reservoir utamanya, berdasarkan asal hewan penyebabnya dan berdasarkan agen penyebabnya. Berdasarkan agen menyebabkan zoonosis dapat digolongkan menjadi beberapa, antara lain:

- 1) zoonosis yang disebabkan oleh bakteri, misalnya antraks, *tuberculosis*, *listeriosis* dll
- 2) zoonosis yang disebabkan oleh virus, misalnya rabies, nipah, avian influenza, dll
- 3) zoonosis yang disebabkan oleh jamur, contohnya *ringworm*
- 4) zoonosis yang disebabkan oleh parasit, contohnya *toxoplasmosis*, *taeniasis*, dan *scabies*.⁷⁸

Berdasarkan asal hewan penularannya, zoonosis dapat dibedakan menjadi menjadi zoonosis yang berasal dari satwa liar, zoonosis yang

⁷⁸Tri Budhi Murdiati Dan Indrawati Sendow, “Zoonosis Yang Dilularkan Melalui Pangan”. *Jurnal Penyakit Menular*, Vol. 16 No. 1 2016, h. 15.

berasal dari hewan yang tidak diperlihara namun berada di sekitar rumah (seperti tikus atau kucing liar), dan zoonosis dari hewan yang diperlihara oleh manusia, baik yang ditularkan dari ternak ataupun dari hewan peliharaan kesayangan seperti anjing atau kucing.⁷⁹

1) *Toxoplasmosis*

Toxoplasmosis merupakan salah satu penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Penyakit ini disebabkan oleh *protozoa* yang disebut *toxoplasma gondii*. Kucing dan beberapa golongan *Felidae* sangat berperan penting dalam penyebaran *toxoplasmosis*. Apabila infeksi *toxoplasmosis* terjadi pada ibu hamil, maka dapat terjadi perkapuran pada bayi, gangguan psikologis, *hidrosefalus*, dan gangguan perkembangan mental setelah anak lahir serta dapat menyebabkan kejang-kejang. *Toxoplasma* di dalam usus kucing dapat berkembang biak secara seksual hingga menghasilkan telur dan keluar bersama feses. Dengan banyaknya kucing yang membuang kotoran di sembarang tempat, memungkinkan terjadinya penularan *toxoplasmosis* sepanjang tahun di Indonesia. Hal ini didukung pula dengan iklim Indonesia yang tropis.⁸⁰

2) *Ring worm*

Ring worm merupakan penyakit pada kucing yang ditularkan dari jamur yang mengandung *spora*. *Ring worm* sangat mudah menular baik melalui kontak langsung ataupun secara tidak langsung

⁷⁹*Ibid*, h. 16.

⁸⁰Wisnu Nurcahyo, Joko Prastowo, Priyowidodo, "Identifikasi Toxoplasmosis Pada Feses Kucing Secara Mikroskopi Dan Serologis". *Jurnal Kedokteran*, Vol 8 No. 2014, h. 147.

melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi, *ring worm* dapat pula menular ke manusia. Penyakit *ring worm* ditandai dengan adanya lesi berbentuk lingkaran di beberapa area tubuh dan menyebabkan rasa gatal pada area tersebut.

3) Rabies

Rabies adalah infeksi virus yang disebarkan dari hewan ke manusia melalui air liur ataupun darah. Ketika terinfeksi virus rabies, kucing akan menunjukkan gejala-gejala tertentu antara lain: kehilangan nafsu makan, bulu-bulunya terlihat berantakan, demam yang ditandai dengan hidung, lidah dan telapak kaki berwarna merah muda, cenderung lebih agresif dan gelisah, air liur yang berlebihan bahkan sampai menetes ke dagu. Umumnya penularan virus ini melalui gigitan, namun cakaran kucing yang terinfeksi virus juga dapat menjadi penyebab penularan rabies ke manusia. Walaupun kucing peliharaan atau rumahan memiliki resiko infeksi yang kecil, kemungkinan tertular rabies tetaplah ada.

4) *Scabies*

Scabies atau kudis adalah penyakit yang menyerang kulit kucing, *scabies* disebabkan oleh parasit sejenis kutu bernama *sarcopates* atau tungau *scabies*. Tungau *scabies* dapat menular ke manusia, gejala klinis akibat infeksi tungau *scabies* akan menimbulkan ruam-ruam dan rasa gatal yang parah terutama pada

malam hari atau setelah mandi.⁸¹ Pada umumnya penularan tungau *scabies* dari kucing ke manusia akan menyerang bagian kulit tertipis pada manusia, seperti di sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, lipatan ketiak, siku bagian luar, pinggang, punggung, pusar, dada termasuk daerah sekitar kelamin pada pria dan daerah *periareolar* pada wanita.⁸²

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang upah jasa ini memang sudah banyak, namun setelah penulis melakukan telaah pada beberapa penelitian belum ada yang secara spesifik meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing (Studi Kasus Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)”

Berdasarkan penelusuran tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan upah jasa yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Ismiyatun dengan judul (2018) “*Sistem Pengupahan Karyawan Peternak Burung Puyuh Di Kolekan Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Akad Ijarah*” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah pembagian sistem kerja yang tidak sesuai yang menyebabkan adanya ketidakadilan

⁸¹Heru Setiawan (Dokter Hewan), Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 22 Januari 2020

⁸²April H . Wardhana, “Skabies: Tantangan Penyakit Zoonosis Masa Kini dan Masa Dalang” *Jurnal Penyakit Menular*, Vol. 16 No. 1 2016, h. 43.

antara pekerja yang rajin dan yang malas. Sistem pengupahan buruh burung puyuh yang dianggap belum sesuai dengan akad *ijarah* juga dianggap menjadi latar belakang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis meneliti tentang bagaimana proses penetapan upah yang dilakukan pada peternak burung puyuh dan Apakah UMKM peternak burung puyuh di Kolekan Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam.⁸³

2. Penelitian ini dilakukan oleh Diyah Anasih Anggriani (2018) dengan judul penelitian yaitu “*Hukum Sewa-Menyewa Pejantan Kucing Ras Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” (Studi Kasus di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan Kabupaten Tulungagung) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung. Pokok masalah yang dibahas di dalam penelitian ini adalah maraknya praktik sewa-menyewa pejantan kucing ras di masyarakat khususnya di kalangan pecinta kucing. Sedangkan praktik tersebut berlawanan dengan adanya Hadis yang melarang meminjamkan pejantan untuk mengawini betina dan menerima upah dari hasil perkawinan. Jadi penulis merumuskan masalah tentang
 1. Bagaimana sistem sewa-menyewa pejantan kucing ras
 2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras

⁸³Ismiyatun, “*Sistem Pengupahan Karyawan Peternak Burung Puyuh Di Kolekan Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Akad Ijarah*”. (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN), Surakarta, 2018), h. 25.

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa pejantan kucing ras.⁸⁴

3. Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Andi Mulyono dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Akademik”* studi kasus di Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Masalah yang dibahas oleh penulis adalah maraknya tempat oknum-oknum yang menawarkan jasa pembuatan karya ilmiah akademik yang dimana seharusnya hal itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa. Peneliti membahas tentang akad apa yang digunakan dalam praktik jasa pembuatan karya ilmiah tersebut dan bagaimana Hukum Islam meninjau hal tersebut.⁸⁵

Berdasarkan pemaparan ketiga penelitian tersebut di atas ada perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang adalah segi yang menjadi fokus penelitian.

⁸⁴Diyah Anasih Anggriani, *“Hukum Sewa-Menyewa Pejantan Kucing Ras Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*. (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN, Tulungagung, 2018), h. 28.

⁸⁵Andi Mulyono *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Akademik”*. (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), h. 30.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sidoarjo: CV Cahaya Intan, Cet XII, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Ed. IV, Cet. Ke. VII, 2010
- Afzalurrahman, *Doktrin ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti, Jilid II, 1995.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar al-A'qalani, *Bulughul Maram*, terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi Jakarta: PT Gramedia 2013.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke III, 2003.
- Asy-Syaikh Ali, *Terjemahan Fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Baqir Syarif Qorashi, Ali Yahya, *Huququl 'Amil Fil Islam, Terjemahan, , Keringat Buruh Hak Dan Peran Pekerja Dalam Islam*, Jakarta: Al Huda, 2007.
- Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014.
- Dellmann, H, Dieter, *Buku Teks Histologi Veteriner II*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet III, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al - Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, Jilid 7 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987.

Desi Saraswati, *242 Tips Merawat Binatang Kesayangan*, Jakarta: Penebar Swadaya, Cet. I, 2009.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwah Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Fatwah Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MU/VI/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

H. Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, Ed. I, Cet. Ke. II, 2017.

H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke.V, 2010.

I Komang Wiarsa Sardjana, *Bedah Veteriner*, Surabaya: Unair Press, 2011.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009.

Imam Syaukani, *Nailul Authar*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.

Kris H. Timotius, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2017.

Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012.

Muhammad A. Suwed, A.Redome Napitulu, *Panduan lengkap Kucing*, Bogor: Penebar Swadaya, 2011.

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Muhamad Shalih al-Munajjid, *Intisari Fikih Islami, terj.* Nurul Mukhlisin, Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007.

- M Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, *Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran*, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nelson, R.W, Couto, C.G, *Small Animal Internal Medicine*, Missouri: Mosby, Ed. 3, 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Rambat, Lupiyoadi, A.Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT. Alma'rif, 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Shaleh al-Fauzan, *Fikih sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000.
- Sulaiman, *Berbisnis Pembibitan Kucing*, Yogyakarta: Lyly Publisher, 2010.
- Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing*, Depok: Arya Duta, 2010.
- Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* Tej. Muhammad Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti 1996.

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yusuf Qardowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Yudhi Prayogo, *Cat Lovers Book*, Jakarta: Gagas Media, 2013.

Zinuddin Ali, *Hukum, Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal

Andi Mulyono “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Akademik*”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

April H . Wardhana, “*Skabies: Tantangan Penyakit Zoonosis Masa Kini dan Masa Dalang*” *Jurnal Penyakit Menular*, Vol. 16 No. 1, 2016.

Diyah Anasih Anggriani, “*Hukum Sewa-Menyewa Pejantan Kucing Ras Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN, Tulungagung, 2018.

Ismiyatun, “*Sistem Pengupahan Karyawan Peternak Burung Puyuh Di Kolekan Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Akad Ijarah*”. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN), Surakarta, 2018

M. Ali Fahmi Firmansyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Upah Pandego Dengan Sistem Persenan di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Tri Budhi Murdiati Dan Indrawati Sendow, “*Zoonosis Yang Dilularkan Melalui Pangan*”. *Jurnal Penyakit Menular*, Vol. 16 No. 1, 2016

Wisnu Nurcahyo, Joko Prastowo, Priyowidodo, “*Identifikasi Toxoplasmosis Pada Feses Kucing Secara Mikroskopi Dan Serologis*”. *Jurnal Kedokteran*, Vol 8 No. 2, 2014.

Wawancara

Abdul Ghoffar, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 10 April 2020.

Annisa Ade, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 1 April 2020.

Ferawati, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 20 Maret 2020.

Heru Setiawan, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan GRANDIA Pet Care, Bandar Lampung, 22 Januari 2020.

Linda Saputri, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 20 Maret 2020

Rachma Avina, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 25 Maret 2020.

Rehan, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 20 April 2020.

Rizka Maulina, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 4 April 2020.

Tessa Aini, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 4 April 2020.

Witri Arum, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 25 Maret 2020.

Yuli Tri Utami, Wawancara Dengan Penulis, Klinik Hewan Grandia Pet Care, Bandar Lampung, 18 Februari 2020.

Sumber online

<http://www.disnaksubang.com/berita-pendampingan-dan-pelatihan-sterilisasi-pada-anjing-dan-kucing.html>, (25 september 2019 pukul 19.00 wib).

Wikipedia”, Ensiklopedia Bebas, Diakses Pada Jumat 14 Februari 2020 (23.00 WIB)